

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Adji, H. (2009). *Meneropong Khaznah Notaris dan PPAT Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. (2014). *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Jiwan Dono. (2014). *Keududukan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik*. Bandung: Revika Aditama.
- Arba. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar Efendi. (2012). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budi Untung. (2015). *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Efendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori and Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Widhi. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan "Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif"*. Yogyakarta: Thafa Media.
- HS, S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
- HS, S. (2019). *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- lubis dan Abd. Rahim Lubis. Mhd Yamin. (2008). *Hukum Peendaftaran Tanah*. Bandung: Mndar Maju.
- Muchsin. (2008). *Aspek Kebijaksanaan Hukum Pentagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A.I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Prdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- R. Soeroso. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, cetakan kesebelas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. (2015). *Teknik Pembuatan Akta, cetakan 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Rajawali.
- Samsaimun. (2018). *Peraturan Jabatan PPAT*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2016). *Pejabat Pembuat Akta Tanah cetakan 1*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerodjo, Irawan. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sulhan. (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Paduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sumarja. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah, setakan 6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiradi, G. (2005). *Reforma Agraria untuk pemula*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746)

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Ketentuan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis di Daerah
Uji Coba

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

JURNAL

Boedi Harsono, "*PPAT sejarah tugas dan kewenangannya*". Majalah RENVOI
Nomor 844 tahun 2007.

Sri Winarsi, "*Pengaturan Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum*". Majalah
YURIDIKA Volume 17 Nomor 2 tahun 2002.

Urip Santoso, "*Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Atas Tanah Yasan*", Majalah
Yuridika, Vol. 20 No. 5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, September 2005.

- Urip Santoso, *“Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah”*,
Majalah Yuridika, Vol. 21 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, Mei 2006.
- Erna Widiya Astutik, *“Pajak Yang Terutang Atas Objek Pajak Yang Berkaitan
Dengan Akta PPAT”*, Thesis, Universitas Airlangga, 06 Juni 2017
- Muhammad Irsan Sugeng, *“Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Gowa”*, Jurnal
Yustisiabel, Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Luwuk, Oktober 2020.
- Sunaryati Hatono, *“Membangun Budaya Hukum Pancasila Sebagai Bagian Dari
Sistem Hukum Nasional Indonesia”*, Jurnal Veritas Et Justitia, Vol. 1, No.
2, 2015, hal. 256.
- Komang Febrinayanti Dantes & I Gusti Apsari Hadi, *“Kekuatan Hukum Akta Jual
Beli Yang dibuat oleh Camat dalam Kedudukannya sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ditinjau dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT”*
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 3, 2021, hal. 907
- Ronal Ravianto & Amin Purnawan, *“Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dengan Pendekatan Self Assessment System”* Jurnal Akta, Vol.
4 No. 4, 2017, hal 567
- Iga Gangga Santi Dewi, *“Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam Jual Beli Tanah”* Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, 2010,
hal. 129
- Tamrin Muchsin, dkk, *“Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal Pendaftaran
Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum”* Jurnal Ilmiah
Madani Legal Review, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 71
- Barita Raja Simarosit, *“Pembuatan AJB Oleh PPAT dalam Kaitannya Dengan
Kewajiban BPHTB (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*

Nomor:1395/K/PID/2017)” Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 21 No. 1, 2021, hal 93

I Gusti Bagus Yoga Prawira, *“Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah”* Jurnal IUS, Vol. 4 No. 1, 2016, hal 67

Imam Surya Saputra, dkk *“Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum”* Jurnal IUS Kajian Hukum, Vol. 8, No. 2, 2020, hal 288

Arifin Saleh dan Tan Kamello *“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta PPAT di Kota Binjai”* Jurnal Mercatoria Juni, Vol. 7, No. 1, 2014, hal 8

Kadek Cahya Susila Wibawa *“Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegheid”* Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No. 1, 2019, hal 45

Ardanto Nugroho, dkk *“Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta untuk Menghindari Pajak”* Diversi Jurnal Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol. 7, No. 2, 2021, hal 322

Mega Mentari, dkk *“Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS terhadap Batas Waktu Pendaftaran Akta Jual Beli Tanah Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi di Kota Depok)”* Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 9, No. 2, 2020, hal 365

Ratih Mega Puspa Sari dan Gunarto *“Peranan PPAT dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli”* Jurnal Akta, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 5, No. 1, 2018, hal 243

Harnita, dkk *“Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh”* Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8, No. 3, 2019, hal 359

SKRIPSI

Herliyanti. 2008. *Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Damayanti, Purnandari. 2015. *Tinjauan Yuridis Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Di Kantor PPAT Kabupaten Gunungkidul)*, Ilmu Hukum Fakultas Syai'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

